

Partisipasi masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia dalam melanjutkan pendidikan: Studi di perbatasan Aruk Kabupaten Sambas

Desca The Purnama*¹, C Chairnar¹, Nikodemus Niko²

¹ Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kalimantan Barat 78124, Indonesia

² Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Jawa Barat 45363, Indonesia

Email: *purnamadesca@untan.ac.id; chairnar@untan.ac.id;
nikodemus15001@mail.unpad.ac.id

Naskah diterima: 22/09/2021; Revisi: 26/10/2021; Disetujui: 24/11/2021

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisa partisipasi masyarakat perbatasan dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang atau satuan pendidikan menengah. Keadaan pendidikan yang cukup memprihatinkan juga di alami wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kecamatan Aruk Kabupaten Sambas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan dimulai sejak Oktober 2020. Kemudian, penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, dimana melalui proses pengumpulan data, intepretasi dan penulisan laporan penelitian. Kemudian teknik keabsahan data adalah triangulasi sumber. Pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui penelusuran daring, instansi kecamatan dan desa. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi pendidikan di wilayah perbatasan mengalami perbaikan ke arah yang lebih maju, dimana sebagian masyarakat sudah memiliki pola pikir yang semakin maju dengan melihat pendidikan bukan hanya sekedar keharusan yang dicanangkan oleh negara, akan tetapi masyarakat mulai berpikir bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan nasib. Dengan berpendidikan artinya mereka memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan kehidupan.

Kata kunci: *perbatasan negara; partisipasi masyarakat; pendidikan*

Participation of the Indonesian-Malaysian Border Community in Continuing Education: Study at the Aruk Border of Sambas Regency

Abstract

This study aims to analyze the participation of border communities in continuing education at the level or unit of secondary education. The state of education is also quite concerning in the natural border area between Indonesia and Malaysia in West Kalimantan Province, precisely in the Aruk District of Sambas Regency. The type of

research used in this study is qualitatively descriptive. The study began in October 2020. Field research was conducted in February 2021. Research data is sourced from primary data and secondary data. The data analysis technique used is qualitative data analysis, which through the process of data collection, interpretation and writing of research reports. Then the data validity technique is the triangulation of the source. Primary data collection with interviews and observations, while secondary data is obtained through online searches, sub-district agencies and villages. The findings of this study reveal that educational participation in the border region has improved in a more advanced direction, where some people already have an increasingly progressive mindset by looking at education as not just a necessity proclaimed by the state. Still, people begin to think that education is essential in determining fate. Being educated means they have the opportunity to make life changes.

Keywords: *borders; community participation; education*

Pendahuluan

Terdapat sekitar 38 kawasan kabupaten dan kota yang letaknya berada di kawasan perbatasan darat yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Berdasarkan perjanjian Lintas Batas antara Indonesia dengan Malaysia tahun 2006, secara keseluruhan disepakati bahwa terdapat 18 pintu batas (*exit and entry point*) di kawasan Kalimantan, dan baru terdapat dua pintu batas resmi yaitu di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau, perbatasan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sambas yaitu perbatasan di Kecamatan Sajingan (Zulkifli, 2014). Posisi Kalimantan sangat penting dan strategis karena menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas barang dan jasa, serta mobilitas penduduk, baik untuk kepentingan bisnis maupun tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia (Nordholt, 1993).

Keberadaan kawasan-kawasan perbatasan membutuhkan perhatian khusus bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu di tingkat pusat maupun lokal. Sebagian besar perbatasan darat negara Indonesia dengan negara Malaysia terdapat di kawasan pulau Kalimantan. Setidaknya terdapat 5 Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat berbatasan darat langsung dengan negara Malaysia. Yang mana pada umumnya masyarakat di perbatasan masih dalam keadaan miskin (Niko, 2017).

Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sangat terbatas (Warsilah & Wardiat, 2017). Pada tahun 2007 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia menegaskan bahwa terdapat enam permasalahan utama pada wilayah tertinggal, yakni: 1) kualitas sumber daya manusia relatif rendah; 2) kurangnya sarana dan prasana (infrastruktur); 3) terbatasnya akses ekonomi, informasi dan teknologi; 4) terdapatnya gangguan keamanan dan bencana; 5) merupakan daerah perbatasan, terisolir, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses terbatas; dan 6) kebijakan pembangunan yang kurang tepat.

Rangkuti (2010) menyebutkan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan masih tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Jika dibandingkan dengan negara tetangga khususnya Malaysia, kesenjangan terlihat dengan jelas pada berbagai aspek, baik aspek infrastruktur, sosial, maupun ekonomi. Pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan masih terhambat karena akses dan infrastruktur yang belum memadai (Bunau dkk., 2011; Itasari, 2018; Normina, 2016; Suciati & Ariningsih, 2016).

Kemudian, apabila ditinjau dari aspek keamanan, kondisi ini sangatlah rawan, karena wilayah perbatasan merupakan wilayah strategis yang mudah terinfiltrasi secara langsung maupun tidak langsung oleh negara lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kultural. Oleh karena itu, [Sutiyono \(2018\)](#) menyebutkan bahwa perlu adanya reformulasi pendidikan kewarganegaraan di perbatasan untuk mendapatkan kerangka pendidikan bela negara dan cinta tanah air yang tepat. Hal ini bertujuan agar warga Indonesia di wilayah perbatasan tidak mudah tergoda dengan ideologi ekonomi makmur yang ditawarkan negara tetangga.

Pada dasarnya wilayah perbatasan di Kalimantan Barat secara umum memerlukan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu meningkatkan kualitas SDM lokal di perbatasan negara. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah perbatasan yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan yang bermutu, jelas diperlukan perhatian dan analisisnya terhadap segenap subsistem atau komponen pendidikan yang ada, di antaranya masukan siswa, sarana-prasarana, ketenagaan, biaya pendidikan, kurikulum, dan hasil belajar. Perlu diketahui bagaimana kondisi dari komponen-komponen tersebut, kemudian dianalisis sejauh mana pengaruh komponen tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang ada di wilayah perbatasan.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Agung \(2012\)](#) yang mengkaji tentang penyelenggaraan pendidikan di perbatasan yang masih belum optimal karena keterbatasan infrastruktur. Lebih lanjut kajian [Normina \(2016\)](#) menyebutkan bahwa partisipasi pendidikan masyarakat di perbatasan masih tergolong rendah karena akses dan kondisi geografis perbatasan yang masih terpencil dan terisolir. Kemudian, [Itasari \(2018\)](#) yang mengkaji tentang bagaimana pemerintah berperan penuh dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara di perbatasan, namun hak pendidikan belum terpenuhi karena terhambat aksesibilitas dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai di wilayah batas negara. Kemudian, [Mulyadi dkk. \(2020\)](#) menyebutkan bahwa komunikasi pembangunan secara umum di wilayah perbatasan belum optimal dilakukan, termasuk pembangunan pendidikan. Pada penelitian ini, kami secara spesifik mengkaji tentang partisipasi pendidikan masyarakat, terkhusus dalam melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan menengah di wilayah perbatasan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data sekunder dilakukan dengan pengumpulan referensi dan dokumen yang relevan untuk menunjang penelitian ini. Informan penelitian dipilih dengan cara penyampling bertujuan (*purposive sampling*), oleh karena itu kriteria informan dapat dijelaskan sebagai berikut: a) masyarakat asli di perbatasan Kecamatan Aruk; b) mengetahui persoalan pendidikan di perbatasan dalam 10 tahun terakhir; c) orang tua yang memiliki anak yang sedang sekolah. Adapun informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kaliau, Camat Aruk, Orang tua siswa, beberapa siswa-siswi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Wawancara dilakukan dengan tatap muka, yang diperkirakan menghabiskan waktu 45-60 menit tiap informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 1. Informan Penelitian

No.	Nama Inisial	Jenis Kelamin
1.	TR	Perempuan
2.	UT	Laki-laki
3.	TW	Laki-laki
4.	PT	Laki-laki
5.	TK	Perempuan

Sumber: Peneliti, 2021

Periode penelitian ini dimulai sejak penyusunan proposal penelitian yaitu pada bulan Oktober 2020. Kemudian, pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021. Sehingga dalam proses pengumpulan data, mengutamakan protokol kesehatan selama di lapangan penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah sumber dan informasi yang didapatkan dari lapangan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif yang kami himpun melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara bersamaan.

Kemudian, data yang didapatkan dari lapangan penelitian selanjutnya divalidasi dengan teknik pengabsahan data triangulasi sumber. Adapun tahapan yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yaitu dengan cara penulis melakukan perbandingan data yang didapatkan dari hasil observasi, seperti mengamati kegiatan masyarakat di Desa Kaliu, Kecamatan Aruk, Kabupaten Sambas.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat Perbatasan Dalam Melanjutkan Pendidikan

Partisipasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan, dengan adanya animo masyarakat yang mau berperan serta ke dalam pendidikan akan memperlihatkan bagaimana perkembangan wilayah perbatasan nantinya selain itu keikutsertaan masyarakat akan membuat perubahan dalam dunia pendidikan khusus nya di wilayah perbatasan. Partisipasi masyarakat menurut [Adi \(2007\)](#) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Keberadaan masyarakat dan pemerintah dalam membentuk sistem pendidikan menciptakan hubungan timbal balik diantara keduanya. Artinya bahwa perlu adanya kesadaran kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan ([Normina, 2016](#)). Kemudian pada lain pihak, negara sudah semestinya memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan pendidikan; mulai dari ide kebijakan hingga pada implementasi.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga dibutuhkan khusus nya di wilayah perbatasan Kecamatan Aruk, Kabupaten Sambas. Yang kita tahu bahwa wajah pendidikan di wilayah perbatasan Kecamatan Aruk sangat rendah rata-rata masyarakat di tingkat Sekolah Dasar (SD), hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana keadaan pendidikan masyarakat perbatasan di wilayah Kecamatan Aruk terutama peran masyarakat yang ikut ke dalam pembangunan pendidikan (partisipasi masyarakat).

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber, menjelaskan bahwa dulu kondisi pendidikan memang masih rendah pada tingkat SD, SMP dan SMA, akan tetapi untuk saat ini dimulai dengan tahun 2018 an ada peningkatan taraf pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Berikut isi wawancara penulis dengan kepala Desa Kaliau Bapak Jamel :

“Kalo duluk memang partisipasi masyarakat tuk pendidikan memang rendah, karne fasilitas pendidikan di desa kayak SD, SMP, SMA haros ke Sambas. Jadi tuk sekolah butuh biaya yang banyak tapi kalo sekarang partisipasi sudah mendingan karne uda didukung oleh fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, sudah ade di Kecamatan dan di Desa.” (Kalau dahulu tingkat partisipasi masyarakat untuk pendidikan masih rendah, dikarenakan fasilitas pendidikan di Desa seperti SD, SMP dan SMA harus pergi ke Sambas. Jadi untuk sekolah butuh biaya yang banyak, tapi kalua sekarang partisipasi sudah ada peningkatan karena sudah didukung oleh fasilitas pendidikan SD, SMP dan SMA sudah ada di Kecamatan dan di Desa).

Jika dilihat dari hasil wawancara bersama kepala Desa Kaliau Bapak Jamel, bahwa adanya peningkatan taraf pendidikan dalam keikutsertaan masyarakat ke dalam pendidikan apabila di dibandingkan dengan keadaan dahulu, keadaan cukup berbeda dan fasilitas masih sangat kurang serta ditambah adanya biaya lebih yang dibutuhkan untuk menempuh sekolah. Akan tetapi saat ini, animo masyarakat untuk tetap bersekolah dan melanjutkan sekolah ada peningkatan yang dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas pendidikan yang menunjang di Kecamatan dan di Desa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Camat Aruk mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Menurutnya terjadi perubahan dalam tingkat partisipasi pendidikan di wilayahnya, akan tetapi tidak cukup signifikan karena masih ada beberapa faktor yang menghambat mereka untuk menempuh pendidikan. Berikut hasil wawancara bersama Camat Aruk:

“Kalo dilihat disini pendidikan sudah bagus dengan sudah tersedianya bangunan sekolah dan dana BOS, kalo duluk kan memang di Desa ini jangkauan tuk sekolah jauh harus ke Sambas. (Kalau dilihat saat ini pendidikan disini sudah bagus, dengan tersedianya bangunan sekolah dan dana BOS, kalau dahulu memang di Desa ini jangkauan untuk ke sekolah jauh harus ke Sambas/ibu kota kabupaten).

Dalam wawancara kedua narasumber, terlihat bahwa pendidikan di desa ataupun di kecamatan sudah mengalami perubahan yaitu dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia, sebelumnya hambatan anak-anak untuk sekolah atau melanjutkan sekolah yaitu dikarenakan akses sekolah atau jarak yang cukup jauh. Selain itu menurut pihak dinas pendidikan Kabupaten Sambas, partisipasi masyarakat dalam pendidikan khususnya di desa Kaliau maupun di wilayah Sambas terjadi perubahan, akan tetapi sama halnya dengan kepala Camat Aruk yaitu dimana perubahan itu belum begitu besar karena masih banyak pengaruh atau faktor lain yang mempengaruhi anak untuk bersekolah.

“Partisipasi anak untuk sekolah cukup mengalami perubahan, ndak same kayak dulu cume ndak juga besar. Masih banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak untuk sekolah atau untuk melanjutkan sekolah nye. (Partisipasi anak untuk bersekolah saat ini cukup mengalami perubahan, tidak sama seperti dahulu, akan tetapi tidak besar. Masih banyak faktor yg mempengaruhi anak-anak untuk sekolah atau untuk melanjutkan sekolahnya).

Kemudian, wawancara juga dilakukan dengan salah satu guru untuk memberikan informasi mengenai masalah partisipasi pendidikan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan ibu Kristina, partisipasi anak untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah tidak seburuk 3 tahun yang lalu. Saat ini masih ada beberapa anak ataupun orang tua nya tidak melanjutkan pendidikan anak nya, akan tetapi tidak dengan jumlah yang besar. Guru kurang terampil memilih dan memanfaatkan media, sumber belajar, metode guna mendukung tujuan pembelajaran berbasis karakter (Suharto, 2017). Berikut hasil wawancara penulis dengan ibu Kristina selaku guru Sekolah Menengah Pertama:

“Mereka yang ndak sekolah atau yang ndak lanjut tadak terlalu ramai hanya 1 atau 2 orang yak. Tapi masih ade lah untuk yang ndak mau lanjut klo dilihat ndak kayak dulu lah 3 tahun lalu agak banyak. (Mereka yang tidak mau sekolah atau tidak melanjutkan tidak terlalu ramai hanya 1 atau 2 orang saja. Tapi masih ada yang tidak mau lanjut, kalua dilihat tidak seperti 3 tahun yang lalu masih banyak yang tidak mau sekolah).

Selain penulis juga mewawancari beberapa orang tua siswa yang dimana anaknya melanjutkan pendidikan sampai ke tahap selanjutnya. Menurut Farida, anak nya dituntut untuk bersekolah biar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tidak mengikuti jejak orang tua nya yang tidak tamat sekolah. Berikut penuturan ibu Farida selaku orang tua siswa:

“Anak saye, saye suroh sekolah biar ndak kayak saye teros biar bise dapat kerje yang bagos, karne saat ini pendidikan tuh penting buat die nanti cari kerje.” (Anak saya, saya suruh untuk melanjutkan sekolah supaya tidak sama seperti saya, selain itu biar mendapatkan pekerjaan yang bagus, karena saat ini pendidikan sangat penting buat nanti dia mencari kerja).

Wawancara juga kami lakukan dengan salah satu siswa yang melanjutkan sekolah nya. Menurut Sunis, pendidikan penting dan dia wajib untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan karena pemerintah telah menyiapkan bantuan bagi mereka yang mau bersekolah. Berikut hasil wawancara dengan Sunis:

“Pendidikan tuh penting, bise dapat kerjaan yang bagos nanti klo kite sekolah. Selaen itu bantuan pemerintah pon ade jadi bise lah buat lanjut sekolah. (Pendidikan itu penting, bisa mendapatkan kerjaan yang bagus kalua kita bersekolah. Selain itu bantuan pemerintah juga ada, jadi bisa buat melanjutkan sekolah).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa partisipasi pendidikan yang ada di wilayah Desa Kaliau, Kecamatan Aruk Kabupaten Sambas mengalami proses perubahan dari wajah pendidikan sebelumnya. Masyarakat mulai sadar tentang pendidikan dan mereka ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan, beberapa di antaranya sadar bahwa pendidikan penting untuk kelangsungan kehidupan dan untuk mendapatkan pekerjaan nanti nya.

Akan tetapi partisipasi pendidikan saat ini jika diamati belum sangat signifikan, hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Belum signifikan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terlibat atau ikut ke dalam dunia pendidikan. Dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta bersekolah bukan lah hal yang mudah, banyak faktor yang mempengaruhi keputusan untuk tetap bersekolah. Sebagian dari mereka yang memiliki akses dan kapital yang besar tidak akan ragu untuk melanjutkan sekolah dan ikut berpartisipasi dalam pendidikan, hal yang berbeda jika mereka yang sulit mempunyai akses dan capital yang rendah pertimbangan untuk bersekolah sangat rumit.

Dalam bentuk partisipasi, masyarakat tidak hanya diletakkan sebagai sosok yang pasif akan tetapi masyarakat harus bisa aktif yaitu dengan cara ikut serta dalam kebijakan atau program itu. Masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam mewujudkan kualitas pendidikan memiliki partisipasi yang tinggi dan dukungan ([Idrangingrum, 2018](#)). Letak eksistensi masyarakat dalam partisipasi menjadi hal yang seutuhnya, masyarakat dilibatkan dan tidak hanya sekedar menerima saja. Dalam kasus partisipasi pendidikan ini, masyarakat dilibatkan melalui komite sekolah, dalam hal ini sekolah maupun komite sekolah menjadi perantara atau tempat untuk melibatkan masyarakat.

Jika dilihat dari bentuk partisipasinya, partisipasi masyarakat Desa Kaliau dalam hal partisipasi pendidikan yaitu berbentuk partisipasi vertikal. Partisipasi vertikal ini masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada di posisi sebagai pengikut atau klien. Artinya masyarakat dalam hal ini, tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan penuh untuk terlibat dalam masalah pembangunan pendidikan. Masyarakat sebagai pengikut atas apa yang dilakukan pemerintah setempat, masyarakat sebagai klien terhadap program-program pendidikan yang pemerintah canangkan.

Berdasarkan bentuknya partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi non fisik dan partisipasi fisik ([Makhmudi & Muktiali, 2018](#)). Keadaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di wilayah perbatasan bentuknya sebagai partisipasi non fisik. Partisipasi non fisik partisipasi keadaan dimana keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Beberapa masyarakat di wilayah perbatasan, sudah memiliki perspektif jika pendidikan begitu penting. Semangat dan antusias mereka bertambah mengingat fasilitas yang diberikan pemerintah yaitu berupa gedung sekolah yang tidak lagi jauh untuk mengaksesnya. Menurut penulis partisipasi non fisik berujuk pada kemampuan nalar masyarakat untuk berpikir tentang pentingnya pendidikan. Artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan merujuk pada proses merencanakan, menentukan, menjalankan, mengawasi dan melakukan evaluasi ([Normina, 2016](#); [Wiratno, 2016](#)).

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat sudah mampu menelaah bahwa pendidikan menjadi hal penting, dilihat dari sebagian masyarakat memiliki pola pikir yang semakin maju yang menganggap pendidikan sangat penting dan menganggap pendidikan sebagai salah satu jalan untuk memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan. Sehingga, dengan kemampuan nalar masyarakat yang menganggap pendidikan bagian penting dalam kelangsungan hidupnya, pemerintah menjadi terbantu dan tidak begitu sulit mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Pergeseran paradigma dengan meletakkan pendidikan merupakan bagian penting, tidak hanya dipengaruhi melalui berbagai informasi atau sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah, akan tetapi hal ini juga di pengaruhi oleh keberadaan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jika kita liat di Desa kaliau memiliki sarana gedung sekolah yang lengkap mulai dari gedung sekolah SD, SMP dan gedung sekolah SMK, keberadaan gedung ini secara langsung mempengaruhi keputusan masyarakat untuk bersekolah dan dapat mengurangi hambatan-hambatan seperti akses yang jauh untuk bersekolah.

Pembenahan Pendidikan di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan memiliki segudang masalah sosial dan pemerintah memiliki tugas rumah yang berat, rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap rendahnya sumber daya manusia (SDM), sehingga secara langsung pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan pemenuhan SDM berkualitas. Keberadaan pendidikan di wilayah perbatasan juga harus didukung dengan keberadaan masyarakat yang mau berperan serta ke dalam nya, kedua nya merupakan sebuah dualitas yang tidak dipisahkan antara lembaga pendidikan dengan individu didalamnya.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, serta SDM yang memiliki potensi dan produktif bagi pembangunan. Pembangunan pendidikan dapat berupa pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan, dalam rangka menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat dan pembangunan itu harus menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu proses usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang baik sehingga mampu merubah dan mengembangkan kemampuan peserta didik kearah yang lebih baik yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, dimana tiap warga negara memiliki hak yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Pembangunan pendidikan kini tidak bisa lagi dikembangkan dalam perspektif ke dalam (*inward looking*), yaitu dalam rangka mendidik manusia agar cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan berkepribadian mulia. Pendidikan mesti berorientasi keluar (*outward looking*), yakni untuk menumbuhkembangkan sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang baik di masyarakat (Agung, 2012).

Daerah perbatasan memerlukan sentuhan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu berdaya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM-nya. Melalui peningkatan kualitas SDM ini menjadi pintu masuk guna meningkatkan taraf dan

kesejahteraan hidup masyarakat di daerah perbatasan Aruk yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan. Dengan kata lain bahwa kualitas SDM masyarakat di perbatasan Aruk menjadi titik dalam melihat kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan.

Atas dasar itu untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan yang bermutu, jelas diperlukan perhatian dan analisisnya terhadap segenap subsistem atau komponen pendidikan yang ada, di antaranya masukan siswa, sarana-prasarana, ketenagaan, biaya pendidikan, kurikulum, dan hasil belajar. Perlu diketahui bagaimana kondisi dari komponen-komponen tersebut, kemudian dianalisis sejauhmana pengaruh komponen tersebut terhadap hasil belajar siswa.

Kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan Aruk masih sangat memprihatinkan apabila dibandingkan dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar. Pendidikan di kawasan perbatasan Aruk hanya mampu menyediakan fasilitas yang jauh dari kata cukup, dengan kata lain bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih sangat minim. Amaliah (2016) menyebutkan bahwa situasi masyarakat yang miskin juga menjadi faktor atas partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan. Dalam hal ini bahwa kondisi ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Aruk masih tergolong masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Berbagai kondisi pendidikan yang ada di sekitar kawasan perbatasan Aruk ini kemudian diperparah dengan aksesibilitas menuju ke sekolah yang buruk, sehingga menghambat guru maupun siswa. Mereka harus menyeberangi sungai, melewati hutan-hutan, bahkan pada beberapa wilayah tidak memiliki akses jalan darat untuk menempuh perjalanan menuju ke sekolah. Butuh waktu lama dan tenaga ekstra karena harus melewati geografis jalan yang sulit dan jauh. Selain itu, tenaga pengajar juga terbatas karena tidak banyak yang mau mengabdikan diri sebagai guru di daerah perbatasan yang terpencil dengan akses yang sulit serta gaji yang kurang memadai.

Itasari (2018) menyebutkan bahwa salah satu klaster permasalahan pendidikan di perbatasan adalah munculnya wilayah-wilayah tak berkeinginan sekolah pada tingkat dasar dan menengah di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, dalam tataran normatif untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang layak, negara memiliki kewajiban memastikan penyediaan sistem pendidikan dan kurikulum yang memadai.

Potret buram pendidikan di kawasan perbatasan Aruk bukanlah hal yang baru. Pada sebagian besar kawasan perbatasan negara di Kalimantan Barat merupakan wilayah tertinggal, sungguhpun peran wilayah perbatasan dalam konsep kedaulatan negara sangat penting. Beranda terdepan negara seolah-olah menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa dan sekaligus gudang keterbelakangan dalam pembangunan nasional, termasuk bidang pendidikan.

Ketimpangan pendidikan dengan negara tetangga Malaysia merupakan faktor utama penyebab anak-anak usia sekolah lebih memilih untuk menimba ilmu di negara tetangga tersebut. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga guru yang berkualitas, biaya pendidikan yang gratis, banyak sekolah yang dilengkapi dengan asrama, termasuk seragam dan buku-buku penunjang sampai jaminan kerja bagi anak-anak Indonesia yang berprestasi. Hal ini menjadi magnet bagi mereka yang berharap untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dan layak.

Kondisi pendidikan di kawasan perbatasan Aruk dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, sehingga lebih banyak siswa yang berasal dari perbatasan Aruk yang memilih sekolah di negeri Serawak Malaysia daripada sekolah di negeri sendiri. Alasannya sangat relevan dan logis, tidak lain karena sekolah di Malaysia tidak dipungut biaya sampai tamat. Kemudian sekolah di Malaysia dilengkapi fasilitas dan sarana prasarana penunjang pendidikan yang sangat baik dan gedung sekolahnya pun jauh lebih bagus dari gedung sekolah di perbatasan Aruk.

Atas dasar itulah dalam penanganan masalah perbatasan diperlukan adanya program yang terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dengan memperhatikan segenap aspek yang mempengaruhi seperti kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, keamanan, konservasi sumber daya alam, dan sumberdaya manusia (penyelenggaraan pendidikan). Dalam pergeseran pendekatan dari keamanan ke arah kesejahteraan, jelas sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan.

Kualitas sumberdaya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Dalam kaitan ini pendidikan memiliki peran penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan, sekaligus wahana untuk membentuk karakter dan sikap kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air yang tinggi. Kemudian kenyataan sampai saat ini, kesempatan anak-anak di perbatasan Aruk untuk memperoleh pendidikan masih sebatas pada tingkat sekolah dasar saja.

Simpulan

Sebagian besar masyarakat sudah memiliki pola pikir yang semakin maju dalam memahami pendidikan. Bukan hanya sekadar keharusan yang dicanangkan oleh negara, akan tetapi masyarakat mulai berpikir bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan nasib. Perbaikan minat masyarakat tidak hanya didasarkan oleh faktor internal dari diri mereka yang menganggap pendidikan itu penting, tetapi juga perbaikan itu juga dipengaruhi oleh pemerintah yang sudah memberikan sarana dan prasarana dukungan serta menyuarakan pendidikan dalam bentuk sosialisasi. Artinya partisipasi pendidikan tidak hanya masalah pemerintah tetapi juga masyarakat juga harus ikut serta dan memberikan dukungan dengan cara ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan.

Adapun rekomendasi hasil penelitian yaitu perlu adanya penguatan kelompok orang tua dan kelompok sebaya, kelompok sebaya adalah orang-orang yang memiliki usia yang sama. Tujuan adanya keterlibatan kelompok sebaya ini yaitu sebagai berikut: a) Memberikan pemahaman dan pengetahuan yang tidak dapat di dapat di dalam keluarga; b) Mentransfer nilai-nilai serta norma sosial dan memberikan pandangan terkait pentingnya pendidikan. Kemudian, partisipasi mereka juga dengan cara melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah sehingga menciptakan pembangunan kearah desentralistik, dengan cara sebagai berikut: a) Melibatkan masyarakat dan orang tua dalam rapat tahunan, dalam hal ini masyarakat dan orang tua sebagai pengawas dan evaluasi untuk memberikan masukan maupun informasi terkait masalah peserta didik ke pihak sekolah. Jadi masyarakat, orang tua dan pemerintah saling membantu dalam proses pengembangan pendidikan; b) Menciptakan komunikasi yang efektif antara pemerintah, pihak sekolah dan orang tua.

Sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar nilai-nilai tradisi Karapan Kerbau sebagai penguatan nilai karakter masyarakat tetap dapat dilestarikan dari pengaruh budaya luar. Sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar nilai-nilai tradisi Karapan Kerbau sebagai penguatan nilai karakter masyarakat tetap dapat dilestarikan dari pengaruh budaya luar.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Fisip UI Press.
- Agung, I. (2012). Kajian penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan. *Jurnal Ilmiah Visi*, 7(2), 173-184.
<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/3671>
- Amaliah, D. (2016). Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(3).
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor/article/download/595/561>
- Bunau, E., Sada, C., Salem, L., & Hanye, P. (2011). Aksesibilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Dasar 9 Tahun di daerah perbatasan Kabupaten Sambas dan Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Cakrawala Kependidikan*, 9(2). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jckrw/article/view/153>
- Idrangingrum, E. (2018). Peran Kepala Sekolah Dan Partisipasi Dari Masyarakat Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Mewujudkan Kualitas Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun. *Jurnal Studi Sosial*, 3, 11-21. <https://core.ac.uk/download/pdf/229495109.pdf>
- Itasari, E. R. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 181-186.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/download/16534/9927>
- Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN PADA PROGRAM PLPBK DI KELURAHAN TAMBAKREJO, KOTA SEMARANG. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 108-117.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/3209>
- Mulyadi, A., Didan, D., & Patimah, S. N. (2020). Komunikasi Pembangunan Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Diwilayah Perbatasan. *Ihtisab*, 1(1), 1-11. <http://jurnal.iais.ac.id/index.php/Ihtisab/article/view/18>
- Niko, N. (2017). Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(1), 32-37.
<https://jurnalaiinpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/829>

- Nordholt, H. S. (1993). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. By BURHAN MAGENDA. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1991. viii, 113 pp. *The Journal of Asian Studies*, 52(3), 794-795. <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-asian-studies/article/abs/east-kalimantan-the-decline-of-a-commercial-aristocracy-by-magendaburhan-ithaca-cornell-modern-indonesia-project-southeast-asia-program-cornell-university-1991-viii-113-pp/FAE1886002E05F713C9D600E8C7C5EF7>
- Normina, N. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *ITTIHAD*, 14(26). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/874>
- Rangkuti, R. (2010). *Pengelolaan Perbatasan Ditinjau Dari Sosial, Ekonomi dan Ekologi Menunjang Pertahanan Negara (National Security) dilihat Sudut Pandang Diplomasi*. . Selectedworks. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1188>
- Suciati, S., & Ariningsih, A. (2016). Pengembangan model pendidikan menengah “sekolah kebangsaan “di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan sebagai implementasi pembelajaran pkn. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 76-85. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1188>
- Suharto, S. (2017). Kemampuan Guru Dalam Engembangkan Perangkat Pembelajaran Ips Berbasis Karakter (Studi Pada Guru Smp Negeri 3 Geger Madiun). *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 2(2), 116-129. <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/gulawentah/article/view/1898>
- Sutiyono, S. (2018). Reformulasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Menguatkan Nasionalisme Warga Negara Muda Di Wilayah Perbatasan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1-16. <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/1824>
- Warsilah, H., & Wardiat, D. (2017). *Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wiratno, B. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), 28-34. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/2062>
- Zulkifli, Z. (2014). Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia). *Cano Ekonomos*, 3(2), 139-158. <https://www.neliti.com/publications/58555/kerjasama-ekonomi-internasional-sebagai-solusi-pengelolaan-kawasan-perbatasan-ne>